

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BPRS Barokah Dana Sejahtera

a. Sejarah BPRS Barokah Dana Sejahtera

Proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Barokah Dana Sejahtera) Yogyakarta di mulai pada bulan Agustus 2005. Saat itu dibentuk tim pendiri yang terdiri dari Drs. Sunardi Syahuri, Ir. Suranto, MT dan Edi Sunarto. Kemudian pada bulan Desember 2005 pengajuan izin prinsip kepada Bank Indonesia dengan pemegang saham berjumlah 10 orang dan terjadi pergantian nama dari PT BPRS Bina Dana Sejahtera menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Barokah Dana Sejahtera) Yogyakarta karena nama sudah dipakai oleh PT yang lain.

Pada tanggal 6 Desember 2006 keluar izin pendirian dari Bank Indonesia dengan nomor : 8/251/DPbs, baru kemudian tanggal 6 juli 2007 disahkan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM dengan nomor W22-00107 HT.01.01-th 2007. Selanjutnya pada tanggal 29 juli 2007 adalah proses penyampaian surat permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Barokah Dana Sejahtera), pemegang saham ditetapkan berjumlah delapan orang.

Pada tanggal 10 oktober 2007 keluar surat izin usaha dari Bank Indonesia dengan nomor 9/51/KEP.GBI/2007. Soft Opening dilaksanakan pada tanggal 1 November 2007, selanjutnya pada tanggal 14 November 2007 PT Perkreditan Rakyat Syariah (Barokah Dana Sejahtera) diresmikan (Grand Opening) oleh Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta Ibu Endang Setyadi dan disaksikan oleh Sekda Kota Yogyakarta. Serta pada tanggal 6 februari 2009 diselenggarakan RUPS pertama tahun buku 2008.

Bank Syariah BDS (Barokah Dana Sejahtera) meresmikan kantor cabang BDS baru yang berada di Jalan Magelang km 12 Sleman, Selasa (10/9). Peresmian juga dihadiri Wakil Bupati Sleman Yuni Setia Rahayu. Direktur Utama Bank Syariah BDS, Edi Sunarto mengatakan, ini merupakan kantor cabang pertama di Sleman. Dipilihnya Sleman sebagai lokasi pembukaan kantor cabang, karena potensi perekonomiannya yang terus berkembang. “tingkat ekonomi Sleman tertinggi kedua di Yogyakarta. Sehingga kami sengaja memilih Sleman untuk membuka kantor cabang. Kami berharap, BDS mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Sleman,” katanya.

b. Profil Lembaga

Bank Syariah BDS atau PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera berdiri pada tahun 2007 di Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta. Hadir lebih dari 9 tahun menyelenggarakan aktivitas perbankan

syariah yang diawali dengan keuntungan di awal tahun berdirinya telah menjadikan Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera sebagai BPRS terkemuka di DIY. Adapun sekilas tentang Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera dapat dituliskan sebagai berikut.

Nama : PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera

Tanggal Operasional : 14 November 2007

Kantor Pusat : Jl. Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta

Telp : (0274) 383009

Fax : (0274) 374602

Kantor Cabang : Jl. Magelang Km 12,5 Wadas, Tridadi
Sleman Yogyakarta

Telp : (0274) 868532

Fax : (0274) 868532

Kantor kas RSIY PDHI : RSIY PDHI Jl. Solo Km. 12,5 kalasan
Sleman Yogyakarta Telp. 0851 00008285

Kantor Kas Kulonprogo : Jl. Sugiman No. 14 Pengasih Pengasih
Kulonprogo Telp. (0274) 2890319

Email : bprs_bds@yahoo.com

Website : www.bprs-bds.co.id

c. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada ummat”.

Misi :

- 1) Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian
- 2) Memberikan pelayanan prima dan optimal pada nasabah, mengembangkan dan menumbuhkan sektor riil berbasis bagi hasil
- 3) Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan aspek profesionalitas dan spiritualitas
- 4) Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh stakeholder
- 5) Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat.

d. Sumber Daya Manusia BPRS Barokah Dana Sejahtera

Sumber Daya Manusia merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena keberadaanya menjadi poros keberlangsungan sebuah lembaga. Tanpa sumber daya manusia yang berkompeten, berapapun banyaknya sumber daya alam yang tersedia tidak akan mampu dikelola dengan baik dan menghasilkan. Oleh karena itu, sebagai salah satu organisasi syariah, maka BPRS Barakah Dana Sejahtera memiliki sumber daya manusia yang

berkompeten dibidangnya, yaitu ditunjukkan dengan Struktur Kepengurusan BPRS Barokah Dana Sejahtera sebagai berikut:

Profil pengurus dan pengelola PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta:

- 1) Pemegang Saham : a). Drs. H. Sunardi Syahuri
: b). H. Budi Setyagraha
: c). H. Supriyo
: d). H. Lono Prayogo
: e). H. Muhammad Hibatullah
: f). Ir. H. Suranto
: g). Ir. Dwi Aryanti Hariyadi
: h). M. Zuhri H. Dipl. Rad
- 2) Dewan Pengawas Syariah : a). Drs. H. Sunardi Syahuri
: b). H. Tulus Mustofa, lc. MA.
- 3) Dewan Komisaris : a). Ir. H. Sunarto, MT.
: b). H. Lono Prayogo
- 4) Dewan Direksi : a). Edi Sunarto, SE
: b). Ahmad, SP
- 5) Internal Auditor : Lia Solihah J.M, SE, I
- 6) Manajer Marketing : Anis Mu'arifah, S.E
Account Officer : Adnan Prabowo
a) Taufik
b) Eko Hidayatul Fikri

- c) Endra Nuryanto
 - d) Galih Kurniawan
 - e) Nur Hadi Ariyanto
 - f) Fatah
- Funding Officer* : Rini Dwi Andari
- Remedial* : Rohmat Basuki
- Legal Officer* : Anton Dwiyono
- Admin Legal* : Inda Pawestri
- 7) Manajer Operasional : Anjir Masrukhan, S.E
- Akunting : Santi Budi Utami
- Teller : a) Rizki Wulandari
- b) Hapsari Ken Palupi
- Costumer service : Gita Desi Erawati
- Adm pembiayaan : Randi
- Peronalia dan umum : a) Perdana Leone Sembada
- b) Andi Listiyanto
- c) Toharudin
- d) Umar Dwi Listiyo
- Information Teknologi : Soni Setiawan
- e. Lingkungan Kerja BPRS Barokah Dana Sejahtera**
- 1) Lingkungan Internal
- Lingkungan kerja internal yang muncul dalam kehidupan sehari-hari diantara para pegawai BPRS Barokah Dana Sejahtera

merupakan kumpulan dari orang-orang profesional dalam bidangnya masing-masing, yang bersedia berbagi informasi kepada mahasiswa magang. Hal ini terlihat dari keramahan yang diberikan baik oleh petugas satpam maupun *customer service* kepada kami ketika menanyakan ketersediaan magang di tempat tersebut. Selain itu, suasana kekeluargaan sangat terasa di lingkup internal BPRS Barokah Dana Sejahtera tersebut, dilihat dari seberapa akrab interaksi antar pegawai BPRS Barokah Dana Sejahtera dengan nasabah.

Budaya kerja “SMART” merupakan budaya yang diterapkan oleh BPRS Barokah Dana Sejahtera diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, menerapkan perilaku positif untuk kepuasan nasabah seperti: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. *Kedua*, berkomitmen melayani dengan baik dan cepat. *Ketiga*, melaksanakan tugas sesuai dengan tuntunan syariah dan perusahaan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, melaksanakan tugas dengan tata kelola organisasi yang sehat, jujur dan berorientasi pada ridha Allah. Kelima, teratur dalam urusan dan komitmen meningkatkan keahlian sesuai tugas.

Dari segi fasilitas, BPRS Barokah Dana Sejahtera memiliki fasilitas yang memenuhi standar dan terbilang cukup baik. Hal ini dinilai dari ruang parkir yang cukup untuk menampung kendaraan baik untuk karyawan maupun nasabah

dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, kondisi ruangan juga cukup kondusif yang dilengkapi dengan ruang tunggu, stand teller dan customer service. Untuk menambah kenyamanan nasabah dan pegawai ruang depan kantor tersebut dilengkapi dengan mesin pendingin. Sedangkan untuk menjamin keamanan dana dan surat-surat berharga milik nasabah dari pencurian, kebakaran atau musibah lainnya semua kantor BPRS Barokah Dana Sejahtera dilengkapi brankas dan peralatan standar perbankan lainnya yang mampu melindungi aset-aset berharga yang dimiliki.

2) Lingkungan Eksternal

BPRS Barokah Dana Sejahtera yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta berada di wilayah yang strategis dan sangat dekat dengan kampung turis, sehingga menjadikan BPRS Barokah Dana Sejahtera berpotensi untuk mendapatkan nasabah.

f. Keistimewaan Lembaga BPRS Barokah Dana Sejahtera

Pada tahun 2007 sampai 2015 BPRS Barokah Dana Sejahtera mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memiliki aset mencapai 63,3 Milyar rupiah. BPRS Barokah Dana Sejahtera dalam kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2008 sudah BEP (Break Event Point) yaitu laba yang telah memenuhi modal awal. Kemudian ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Beragam prestasipun didapatkan yaitu penghargaan dari biro riset majalah INFOBANK mendapatkan gelar “sangat bagus” selama 2 tahun berturut-turut. Penerapan budaya kerja Islami sebagai pedoman dalam berinteraksi maupun bekerja pada karyawan tidak mengurangi kinerja pada setiap karyawan.

Pada tahun 2016 Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera (PT. BPRS BDS) terus menunjukkan trend yang positif, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga, *outstanding* pembiayaan, modal dan laba. Selama tahun 2016 Bank Syariah Barokah Dana Sejahtera mencatat aset sebesar Rp. 78 Miliar atau mengalami pertumbuhan 23,8% dibanding tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga Rp. 64 Miliar atau tumbuh 26,6%. *Outstanding* pembiayaan Rp. 15 miliar atau tumbuh 18% dan laba tahun 2016 sebesar 1,4 miliar atau tumbuh sebesar 1,8%.

Ir. H Suranto MT selaku Komisaris Utama Bank Syariah BDS dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menjelaskan bahwa pada tahun 2017 ini akan menambah modal disetor sebanyak 200 lembar saham atau sebesar 2 miliar sehingga total modal disetor sebesar 6 miliar. Rencana kerja tahun 2017, Bank Syariah BDS kembali memberi reward kepada karyawan berupa pendaftaran Haji kepada Ahmad (Direktur) dan Anis Mu'arifah (Manager Marketing). Pemberian reward sebagai bentuk pengelolaan terhadap aset terpenting perusahaan, yaitu Sumber Daya Manusia guna

meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kontribusi secara optimal guna memenuhi target-target yang telah ditetapkan perusahaan.

g. Produk dan Keunggulan

BPRS Barokah Dana Sejahtera sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*sahibul maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*mudharib*) dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan

Pada bagian Pembiayaan di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera terdapat produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu:

a) Pembiayaan Jual-Beli iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Barang dibelikan oleh pihak Bank.

b) Pembiayaan Bagi-Hasil iB

Pembiayaan untuk pemenuhan modal usaha. Modal sepenuhnya dari bank atau *shahibul maal*, sedangkan nasabah atau *mudharib* yang menjalankan usaha.

Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.

c) Pembiayaan Bermitra iB

Pembiayaan untuk pengembangan usaha atau sebagai penambahan modal atau *modal bercampur*. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan.

d) Pembiayaan Sewa-Beli iB

Pembiayaan dengan prinsip sewa-beli, dimana bank sebagai pemilik asset dan nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan asset beralih dari bank kepada penyewa.

e) Pembiayaan Multi Jasa iB

Pembiayaan berupa jasa pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, persalinan, walimah, umroh dan lain-lain.

f) Pembiayaan Rekening Koran BDS

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu tertentu. Keunggulan yang diperoleh adalah sistem revolving.

Adapun persyaratan umum untuk melakukan pembiayaan iB di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, yaitu :

- (1) Pegawai (yang berpenghasilan tetap)
 - (a) Mengisi formulir pembiayaan
 - (b) Fotocopy KTP suami-istri, fotocopy kartu keluarga, surat nikah 3 lembar.
 - (c) Asli SK pertama, SK terakhir, Taspen, dan fotocopynya sebanyak 2 lembar.
 - (d) Slip gaji terakhir
 - (e) Fotocopy agunan
 - (f) Surat kuasa potong gaji
 - (g) Memiliki rekening tabungan pada BPRS Barokah Dana Sejahtera.
- (2) Wirausaha
 - (a) Mengisi formulir pembiayaan
 - (b) Fotocopy KTP suami-istri, surat nikah, kartu keluarga sebanyak 3 lembar.
 - (c) Fotocopy agunan
 - (d) Fotocopy legalitas Usaha
 - (e) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir
 - (f) Usaha harus sudah berjalan minimal 2 tahun terakhir.

2) Penghimpunan Dana

Pada bagian *funding* di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera terdapat beberapa produk yang yang diperuntukan untuk menghimpun dana pihak ketiga. Menghimpun dana pihak ketiga sangat penting bagi bank karena adanya penghimpunan dana ini, operasional kegiatan bank bisa berjalan dengan baik dan bank mempunyai asset yang kuat. Sebuah lembaga keuangan, bagian *funding* akan berjalan bersama-sama dengan bagian *lending* dana. Jadi antara *funding* dan *lending* harus seimbang atau balance agar bank menjadi kuat kuat dari sisi modal dan likuiditasnya.

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera kepada masyarakat, yaitu:

a) Tabungan Investasi Terencana

Tabungan dengan setoran rutin tiap bulan dengan jangka waktu minimal 2 tahun. Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan bagi hasil deposito 3 bulan, dengan nisbah 47% untuk nasabah dan 53% untuk bank.

b) Tabungan Titipan iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang menggunakan prinsip *al-Wadiah Yad Dhomanah* (titipan). Nasabah dapat menyetor dan menarik uang kapanpun saat

dibutuhkan. Setiap bulan bank akan memberikan bonus yang kompetitif kepada nasabah.

c) Tabungan Investasi iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) dan diperuntukan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara murni syariah. Nasabah dapat menyetorkan uang setiap saat, untuk penarikan pertama, dana di syaratkan telah mengendap selama satu bulan. Bank akan memberikan bagi hasil dari pendapatannya dengan sistem bagi hasil sebesar 22% untuk nasabah dan 78% untuk pihak bank.

d) Tabungan Haji iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang menggunakan sistem bagi hasil. Nasabah dapat menyetor setiap saat sampai dana nasabah mencukupi ongkos untuk naik haji yang ditentukan oleh pemerintah. Bank akan mencukupi kebutuhan dana dengan memberikan bagi hasil optimal dengan nisbah sebesar 27% untuk nasabah dan 73% untuk pihak bank.

e) Tabungan Sekolah iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS khusus putra putri anda yang masih dibangku SD-SMA. Persiapkan

masa depan pendidikan putra putri anda dengan produk ini. Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 27% untuk nasabah dan 73% untuk pihak bank.

f) Tabungan Pelajar iB BDS

Merupakan produk tabungan dengan sistem virtual Account yang menginduk pada rekening sekolah. Tabungan pelajar iB BDS digunakan sebagai sarana edukasi atau literasi keuangan perbankan syariah untuk pelajar.

g) Tabungan iB Qurma

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang dipersiapkan untuk kepentingan Qurban, persiapan walimah ataupun persiapan *aqiqah* bagi putra putri anda yang akan lahir. Tabungan qurma BDS berbasis akad titipan (*wadiah*), bank menyediakan bonus yang menarik setiap bulannya bagi anda yang memanfaatkan produk ini.

h) Tabungan Berhadiah

Tabungan dengan prinsip titipan dengan bonus bulanan yang berhadiah langsung yang bisa dipilih sesuai keinginan nasabah. tabungan dipersyaratkan mengendap dalam jangka waktu tertentu.

i) Deposito iB BDS

Merupakan produk pilihan investasi bagi hasil nasabah dalam jangka waktu 1,3,6 sampai 12 bulan. Deposito ini

ditunjukkan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat.

Adapun untuk persyaratan pembukaan Rekening di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, yaitu :

(1) Tabungan iB BDS

- (a) Minimal Mengisi formulir pembukaan tabungan
- (b) Menyerahkan fotocopy KTP/identitas yang masih berlaku.
- (c) Setoran awal tabungan Rp10.000 untuk tabungan wadiah.
- (d) Setoran awal tabungan minimal Rp50.000 untuk tabungan mudharabah.
- (e) Setoran awal tabungan Haji minimal Rp500.000 selanjutnya Rp100.000

(2) Deposito iB BDS

- (a) Mengisi formulir pembukaan deposito
- (b) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/identitas lain yang masih berlaku.
- (c) Setoran Deposito minimal Rp500.000
- (d) Fotocopy akta pendirian dan NPWP untuk Badan Usaha.

3) Keunggulan

- a) Memberikan kemudahan pada masyarakat yang membutuhkan modal.
- b) Ada toleransi dalam hal pengembalian pembiayaan karena pengembaliannya bisa dicicil dengan jangka waktu tertentutergantung kesanggupan nasabahnya.
- c) Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah, sesuai syariah.
- d) BPRS BDS merupakan partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman selama 9 tahun.
- e) Plafond pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 7 tahun.
- f) Pembayaran angsuran bisa dilayani online dengan margin yang sangat kompetitif.
- g) BPRS BDS adalah satu-satunya bank di Yogyakarta yang memiliki izin tabungan berhadiah untuk nasabah.
- h) Adanya produk baru pembiayaan rekening koran.

2. Identitas Informan

Berikut ini disajikan identitas *informan* penelitian.

Tabel 4.1
Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Budi Nugroho	L	36	S1	Kepala Cabang
2	Anis Mu'arifah	P	35	S1	Manajer Marketing
3	Eko Agus R	L	36	S1	Audit Internal
4	P1	P	36	S1	Nasabah
5	P2	L	35	S2	Nasabah
6	P3	P	30	S1	Nasabah
7	P4	L	36	S1	Nasabah

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa subjek dalam penelitian ini semuanya berusia 30-36 tahun sebanyak 7 (100,0%) subjek. Hal ini menunjukkan bahwa subjek dalam penelitian ini jumlahnya diambil kebanyakan dari usia dewasa pertengahan, di mana subjek sudah cukup dapat memahami tentang permasalahan penelitian terkait dengan masalah peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*.

Bahwa subjek dalam penelitian ini semuanya berpendidikan S1 sebanyak sebanyak 6 (83,3%) subjek. Hal ini supaya hasil wawancara dalam penelitian ini berkompeten dari seseorang yang berpendidikan tingkat tinggi berkaitan dengan masalah peran BPRS Barokah Dana

Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah*. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pihak perusahaan dan nasabah. Hal ini supaya hasil wawancara dalam penelitian ini dapat menyeluruh dari berbagai elemen pelaku (kedua belah pihak) dalam peran pemberi/lembaga pemberdayaan dan orang/perusahaan yang diberdayakan.

3. Peran BPRS BDS Terhadap Pemberdayaan Sektor UMKM Melalui Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang **peran (kontribusi)** perbankan syariah khususnya BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta:

*...“Salah satu peran BDS dalam sektor riil yaitu bisa kita lihat dalam struktur laporan keuangan kita. Jadi saat ini banyak bank-bank syariah yang komposisi dari penyalurannya itu skimnya murabahah, kemudian banyak juga yang menasar dikebutuhan konsumtif sedangkan di BDS itu sendiri hampir berimbang dimana pembiayaan mudharabah sebesar 41,02% dan musyarakah sekitar 51,92% pada desember 2017”.*⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa salah satu peran BPRS BDS dalam sektor riil yaitu bisa dilihat dalam struktur laporan keuangan BPRS BDS. Saat ini banyak bank-bank syariah yang komposisi dari penyalurannya itu *skim-nya murabahah*. Kemudian banyak juga yang menasar pada kebutuhan konsumtif, sedangkan di BPRS BDS hampir berimbang. Hal ini dapat dilihat di neraca BPRS BDS bahwa porsi

⁵⁵ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

pembiayaan *musyarakah* 51,92% yang cukup besar sedangkan pembiayaan dengan *mudharabah* sekitar 41,02%. Dari porsi pembiayaan *musyarakah* yang cukup besar itu maka penyaluran dalam sektor rill juga cukup besar. Hal ini dikarenakan produk *musyarakah* tidak untuk konsumtif dan *murabahah* tidak dapat digunakan untuk modal kerja. Jadi untuk porsi *murabahah*, misalnya seluruh *outstanding* atau penyaluran banyak di *murabahah* tidak berarti penyaluran untuk UMKM-nya tidak banyak. Hal ini dikarenakan *dimurabahah* itu sendiri dapat juga digunakan untuk modal kerja. Contohnya pengemudi Grab, untuk membeli mobil menggunakan akad *murabahah*. Jika skemanya menggunakan akad *musyarakah* pasti akan lebih besar karena peruntukannya untuk usaha.

Berikut ini data pembiayaan *musyarakah* BPRS BDS periode 2013-2017:

Tabel 4.2
Pembiayaan *Musyarakah* BPRS BDS Periode 2013-2017

No	Tahun	Bulan	Pembiayaan BDS (Rp.)
1	2013	Maret	6.554.400,00
2		Juni	8.335.624,00
3		September	9.494.665,00
4		Desember	9.696.569,00
5	2014	Maret	13.029.586,00
6		Juni	17.295.626,00
7		September	16.243.918,00
8		Desember	14.671.690,00
9	2015	Maret	15.804.401,00
10		Juni	18.867.506,00
11		September	18.660.253,00
12		Desember	17.454.033,00
13	2016	Maret	17.603.257,00
14		Juni	21.591.452,00
15		September	22.022.971,00
16		Desember	24.711.651,00

17	2017	Maret	28.004.534,00
18		Juni	30.710.545,00
19		September	31.367.205,00
20		Desember	31.468.153,00

Sumber: BPRS BDS, 2018.

...“Perannya, jadi alhamdulillah. Dari awal operasinal BDS itu memang kita punya visi misi. Jadi secara umum, kita ingin memberikan kemanfaatan pada ummat”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dari awal operasional BPRS BDS memang mempunyai visi dan misi. Secara umum, BPRS BDS ingin memberikan kemanfaatan pada ummat. Di antaranya adalah dengan memberikan kemudahan dalam bentuk pembiayaan, memberikan kemudahan kepada sektor UMKM untuk bisa mendapat pembiayaan yang cepat, efisiensi, dan mudah.

...“Jadi untuk perkembangan BDS dari tahun ke tahun memang mengalami perkembangan dengan mitra yang semakin banyak. Untuk UMKM juga kita pilah-pilah dari yang mikro, kecil, dan menengah”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk perkembangan BPRS BDS dari tahun ke tahun memang mengalami perkembangan dengan mitra yang semakin banyak. UMKM juga dipilah-pilah dari yang mikro, kecil, dan menengah. Kemitraan UMKM sudah ada beberapa yang diikuti sertakan mendukung lembaga-lembaga BMT. Kemudian kemitraan kelompok kecil juga ada pembinaan. Namun dari segi pembinaan masih kurang karena terkait dengan SDM. Kemudian

⁵⁶ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

⁵⁷ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

kelompok mikro dalam arti pembinaan masyarakat tingkat RT, kumpulan dasawisma juga ada program pemberdayaan syariah. Jadi BPRS BDS masuk dalam acara-acara pertemuan RT, pengajian, dan kelompok-kelompok dasawisma.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta adalah penyaluran kredit *musyarakah* dan *murabahah* BPRS BDS yang hampir berimbang. Hal ini dapat dilihat di neraca BPRS BDS bahwa porsi pembiayaan *musyarakah* 51,92% yang cukup besar sedangkan pembiayaan dengan *mudharabah* sekitar 41,02%. Dari porsi pembiayaan *musyarakah* yang cukup besar itu maka penyaluran dalam sektor riil juga cukup besar. Hal ini dikarenakan produk *musyarakah* tidak untuk konsumtif dan *murabahah* tidak dapat digunakan untuk modal kerja. BPRS BDS memberikan kemudahan dalam bentuk pembiayaan, memberikan kemudahan kepada sektor UMKM untuk bisa mendapat pembiayaan yang cepat, efisiensi, dan mudah. Hal ini telah berdampak pada mitra BPRS BDS yang semakin banyak. Kemitraan dengan UMKM dan mendukung lembaga-lembaga BMT. Kemudian kemitraan kelompok kecil juga ada pembinaan masyarakat tingkat RT, pengajian, dan kelompok-kelompok dasawisma.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal **bantuan (pinjaman)**

permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta:

*...“Peran BDS dalam hal bantuan memang cukup banyak dari sektor mikro yang sudah kita salurkan dengan berbagai kemudahan, syarat yang tidak terlalu rumit atau sulit”.*⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran BPRS BDS dalam hal bantuan memang cukup banyak dari sektor mikro yang sudah disalurkan dengan berbagai kemudahan dengan syarat yang tidak terlalu rumit atau sulit. Namun sebagai lembaga perbankkan BPRS BDS juga tidak meninggalkan aspek-aspek frudensial dan aspek kehati-hatian. BPRS BDS sendiri fungsinya hanya sebagai mediator mediasi, sedangkan dana milik nasabah, milik masyarakat, milik umat. Sehingga peran BPRS BDS yaitu mengelola dana masyarakat yang disalurkan dengan kemudahan kepada nasabah atau masyarakat.

*...“Jelas yang pertama itu kita suport dalam bentuk pembiayaan, yang kedua kita suport dalam bentuk pendampingan. Diantaranya ada pelatihan, kemudian ada getering UMKM”.*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BPRS BDS memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan. Hal yang kedua BPRS BDS memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, di antaranya ada pelatihan, *gatering* UMKM. Hal ini merupakan salah satu bagian cara atau peran BPRS BDS yang tidak hanya sekedar dari sisi pendanaan

⁵⁸ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

⁵⁹ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

saja. Beberapa waktu lalu BPRS BDS mempunyai program yang dalam setahun minimal 2 (dua) kali BPRS BDS menyelenggarakan pelatihan. BPRS BDS juga memberikan pelatihan kepada UMKM. Beberapa kali BPRS BDS melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Kemudian di kantor pusat juga pernah mengadakan pelatihan tentang manajemen keuangan/laporan keuangan ke nasabah. Pelatihan bersifat gratis dengan menjaring teman-teman untuk mengikuti pelatihan yang diinginkan. Pematernya dari internal BPRS BDS yang mempunyai kapasitas untuk mengisi pelatihan tersebut. Jika dari internal tidak mempunyai kapasitas, maka pelatihan mengundang dari eksternal.

Terakhir pada tahun 2017 BPRS BDS mengadakan pelatihan. BPRS BDS mengundang dari Dinas Koperasi untuk memberikan penjelasan tentang peluang-peluang mendapatkan bantuan dari koperasi dll. Kemudian BPRS BDS mengundang pelaku dari UMKM yang sudah bagus atau sudah bisa menjadi contoh. Selain BPRS BDS juga mengundang anggota dan menjadi nasabah BPRS BDS. Sehingga memberikan peluang masyarakat yang ingin mengenal tentang BPRS BDS melalui forum pelatihan. Selain nasabapun juga ada yang diundang, artinya BPRS BDS memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa BPRS BDS berperan untuk UMKM. Selain bentuk partisipasi BPRS BDS dalam mengembangkan UMKM juga sebagai bentuk sarana promosi juga kepada masyarakat luas untuk memperkenalkan BPRS BDS.

...“Peran BDS dalam hal bantuan atau pinjaman permodalan cukup banyak pada sektor mikro, adapun kita mempunyai program dimana waktu Ramadhan itu kita memberikan program *al-qord*. *Al-qord* itu hanya membayar pokoknya saja tidak bagi hasil”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran BPRS BDS dalam hal bantuan atau pinjaman permodalan cukup banyak pada sektor mikro. Adapun BPRS BDS mempunyai program di waktu bulan ramadhan memberikan program *Al-qord*. *Al-qord* yaitu produk yang nasabah hanya membayar pokoknya saja atau tidak bagi hasil untuk UMKM yang sudah bekerjasama dengan masjid. Ada beberapa masjid di sekitar BPRS BDS yang mempunyai beberapa remaja masjid dan remaja masjid itu dibina oleh takmir masjid. Kemudian takmir masjid dengan pihak BPRS BDS berupaya untuk memunculkan pemikiran positif terhadap pemberdayaan lingkungan di sekitar dengan memberikan program *Al-qard* (pembiayaan usaha tanpa ada bagi hasil). BPRS BDS juga memberikan perorangan sekitar satu sampai dua juta dalam jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta adalah bantuan (pinjaman) permodalan sudah cukup banyak dari sektor mikro (contohnya; program *Al-qord* atau pembiayaan usaha tanpa ada bagi hasil) yang sudah disalurkan dengan

⁶⁰ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

berbagai kemudahan dengan prinsip frudensial dan aspek kehati-hatian. BPRS BDS yaitu mengelola dana masyarakat yang disalurkan dengan kemudahan kepada nasabah atau masyarakat. BPRS BDS juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, di antaranya ada pelatihan UMKM, pelatihan tentang manajemen keuangan/laporan keuangan ke nasabah, *gathering* UMKM, sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah, mengundang dari Dinas Koperasi untuk memberikan penjelasan tentang peluang-peluang mendapatkan bantuan dari koperasi.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang rata-rata besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta:

...“Jadi kalau dari definitif itu kan mikro itu dari 0 sampai 50 juta, kecil 50 sampai 500 juta, dan menengah sekitar 500 juta sampai 10M”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kalau dari definitif mormatifnya mikro dari Rp0 sampai Rp50.000.000, skala kecil Rp50.000.000 sampai Rp500.000.000, dan skala menengah Rp500.000.000 sampai 10.000.000.000. Jadi dapat dikatakan rata-rata di BPRS BDS masih ada pembiayaan mikro, jadi kalau rata-ratanya di antara Rp30.000.000 sampai Rp50.000.000 karena memang faktualnya ada yang Rp5.000.000, Rp10.000.000, Rp500.000.000 bahkan

⁶¹ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

Rp1.000.000.000. Jadi walaupun mau di rata-rata yaitu sekitar Rp30.000.000 sampai Rp50.000.000.

... “Kalau terkait dengan besaran bantuan itu tidak bisa kita pukul rata. Artinya UMKM itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang dia memang masih pemula, kemudian ada juga yang dia sudah ekspan”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan besaran bantuan tidak dapat dirata-rata. UMKM memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada yang masih pemula, kemudian ada juga yang sudah ekspan. Sehingga nasabah akan mendapatkan bantuan yang berbeda-beda. Misalnya untuk usaha yang masih kecil atau masih pemula, jika BPRS BDS memberikannya tidak sesuai atau lebih besar uang dari usahanya maka akan terjadi *collap*. Termasuk juga ketika UMKM-nya sudah level menengah ke atas, ketika diberikan modal kecil, maka tidak akan cukup untuk menjalankan usahanya. Jadi rata-rata untuk usaha kecil kisaran Rp5.000.000 sampai Rp20.000.000 sedangkan yang sudah besar dapat sampai Rp500.000.000. Tidak setiap bulannya itu jumlah yang mendapatkan bantuan pembiayaan fluktuatif, tetapi stabil.

... “Untuk besarnya bantuan atau pinjaman permodalan pembiayaan musyarakah yang kita salurkan pada UMKM itu berbeda-beda. Untuk pembiayaan musyarakah kalau dimasukkan ke UMKM bisa sampai ratusan juta itu ada”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa untuk besarnya bantuan atau pinjaman permodalan pembiayaan *musyarakah* yang

⁶² Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

⁶³ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

disalurkan pada UMKM berbeda-beda. Pembiayaan *musyarakah*, jika dimasukan ke UMKM dapat mencapai ratusan juta. Contohnya usaha roti milik Pak X yang sudah memiliki pabrik roti. Dari awal memang dibiayai dan biasanya Pak Bowo meminjam ke BPRS BDS mendekati waktu lebaran, karena memang produksinya lebih banyak. Biasanya Pak Bowo meminjam sampai Rp300.000.000, bahkan bulan yang lalu meminjam meminjam sampai Rp500.000.000. Kemudian ada usaha tempe yang meminjam masih puluhan juta.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta adalah dari kriteria UMKM mikro dari Rp.0 sampai Rp50.000.000, skala kecil Rp50.000.000 sampai Rp500.000.000, dan skala menengah Rp500.000.000 sampai 10.000.000.000. Rata-rata di BPRS BDS masih pada pembiayaan mikro di antara Rp30.000.000 sampai Rp50.000.000 karena secara faktualnya ada yang Rp5.000.000, Rp10.000.000, Rp500.000.000 dan bahkan Rp1.000.000.000. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki tingkatan yang berbeda-beda.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta:

*...“ Terkait dengan hal kebijakan, kebijakan kita tidak boleh melanggar dari kebijakan regulasi. Ketika regulasinya sudah seperti ini ketentuannya maka kita harus tetap dalam koridornya ”.*⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan hal kebijakan bahwa kebijakan tidak boleh melanggar dari kebijakan regulasi. Jika regulasinya sudah ada ketentuannya, maka BPRS BDS harus tetap dalam koridornya. Adapun kebijakan internal, misalnya kebijakan terkait dengan nasabah-nasabah yang kecil dimana syaratnya sudah mempunyai izin-izin formal seperti izin usaha dari kelurahan atau dari kecamatan. Kemudian untuk pembiayaan yang besar harus ada NPWP, tetapi yang pembiayaan-pembiayaan sektor UMKM kebijakannya tidak perlu menggunakan NPWP. Selanjutnya untuk laporan keuangan untuk nasabah UMKM juga dipermudah. Contohnya seperti penjual yang ada di pasar, cukup petugas menanyakan pendapatan tiap harinya, kemudian petugas yang memformulasikannya.

*...“Jadi kebijakan dalam hal pemberian bantuan permodalan menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan dalam hal pemberian pembiayaan. Yang pertama kita itu belum bisa memberikan permodalan pada sektor UMKM yang dia baru pemula ”.*⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kebijakan dalam hal pemberian bantuan permodalan menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan dalam hal pemberian pembiayaan. Hal yang pertama BPRS BDS belum bisa memberikan permodalan pada sektor UMKM yang

⁶⁴ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

⁶⁵ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

pemula (usahanya belum berjalan). Tetapi ketika sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun, maka BPRS BDS dapat memberikan permodalan kepada nasabah.

...“Kebijakannya kalau di BDS ini kita bisa lihat dari seberapa jauh BDS itu melakukan pembiayaan *musyarakah* dibandingkan dengan bank lain. jadi bisa dilihat di laporan keuangan BI Publikasi itu BDS paling tinggi pembiayaan *musyarakahnya* dibandingkan BPRS yang lainnya”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kebijakan di BPRS BDS dapat dilihat dari seberapa jauh BPRS BDS melakukan pembiayaan *musyarakah* dibandingkan dengan bank lain. Jadi dapat dilihat di laporan keuangan publikasi BI (Bank Indonesia), BPRS BDS yang tertinggi pembiayaan *musyarakahnya* dibandingkan BPRS yang lainnya. Laporan keuangan publikasi ini juga terlihat berapa persen BPRS BDS menyalurkan pembiayaan *musyarakah* kepada masyarakat. Sehingga BPRS BDS dalam kebijakan-kebijakan untuk mengeluarkan *musyarakah* sangat mendukung dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan publikasi di bagian *musyarakah* yang mana di setiap bank syariah produk *murabahah* yang tertinggi, sedangkan di BPRS BDS hampir berimbang antara *musyarakah* dan *murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal dukungan kebijakan pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta

⁶⁶ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

adalah kebijakan tidak boleh melanggar dari kebijakan regulasi. Adapun kebijakan internal, misalnya kebijakan terkait dengan nasabah-nasabah yang kecil dimana syaratkan sudah mempunyai izin-izin formal seperti izin usaha dari kelurahan atau dari kecamatan. Kemudian untuk pembiayaan yang besar harus ada NPWP, tetapi yang pembiayaan-pembiayaan sektor UMKM kebijakannya tidak perlu menggunakan NPWP, akan tetapi minimal sudah beroperasi selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya untuk laporan keuangan untuk nasabah UMKM juga dipermudah. Contohnya seperti penjual yang ada di pasar, cukup petugas menanyakan pendapatan tiap harinya, kemudian petugas yang memformulasikannya. Dukungan kebijakan pemberian bantuan (pinjaman) permodalan membuat BPRS BDS yang tertinggi pembiayaan *musyarakahnya* dibandingkan BPRS yang lainnya.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif:

...“Iya. ya itu tadi, kita dari hasil analisa nasabah itu sendiri. jadi ketika nasabah itu membutuhkan ya memang benar-benar membutuhkan. Tapi mungkin ada juga nasabah yang mungkin bilang mau usaha A tapi ternyata uangnya digunakan untuk hal lainnya”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam memberikan bantuan (pinjaman) permodalan kepada UMKM yaitu dari hasil analisa

⁶⁷ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

nasabah tersendiri. Jadi ketika nasabah memang benar-benar membutuhkannya. Tetapi mungkin ada juga nasabah yang mungkin menyatakan untuk usaha, tetapi ternyata uangnya digunakan untuk hal lainnya. Misalnya nasabah meminjam uang Rp50.000.000 untuk modal usaha ternyata hanya Rp10.000.000 yang digunakan untuk modal usaha, sedangkan yang Rp40.000.000 untuk menutupi hutang di tempat lain.

*...“Iya, karena kalau dia tidak membutuhkan permodalan ngapain juga kita berikan modal sedangkan dia tidak membutuhkan. Jadi memang malah justru itu yang kita garis bawahi yang akan kita seleksi”.*⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa jika nasabah tidak membutuhkan permodalan, maka BPRS BDS tidak memberikan modal bagi yang tidak membutuhkan. Jadi memang hal itulah yang perlu digaris bawahi dan yang akan diseleksi. Apakah seseorang tersebut benar-benar membutuhkan pembiayaan. Termasuk dalam hitungan nominalpun akan melihat kebutuhan dari permodalannya. Misalnya ada nasabah dengan usaha kelontong mengajukan pembiayaan, maka perlu dilihat berapa struknya, besarnya pengajuan pembiayaan yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya usaha kelontong dengan nilai persediaan sebesar Rp10.000.000 kemudian secara tiba-tiba langsung mengajukan pembiayaan sebesar Rp50.000.000 dan BPRS BDS memberikan Rp50.000.000. Hal ini akan tidak mungkin. Jadi BPRS BDS akan melakukan analisis nominal yang tepat untuk nasabah tersebut. Hal

⁶⁸ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

ini karena, jika nasabah diberikan modal sebesar Rp50.000.000 sedangkan nilai persediaannya hanya Rp10.000.000 maka hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi di BPRS BDS idinamakan analisis kebutuhan modal. Analisis kebutuhan modal itu untuk mengetahui kira-kira nasabah tersebut membutuhkan modal dengan jumlah tertentu. Sehingga BPRS BDS akan memberikan pembiayaan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

*... “Iya, karna bisanya kita lihat dari analisa nasabah itu sendiri. Jadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan berarti memang dia benar-benar membutuhkan pembiayaan tersebut”.*⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa biasanya BPRS BDS melihat dari analisa nasabah tersendiri. Jadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan berarti memang nasabah tersebut benar-benar membutuhkan pembiayaan tersebut.

Berikut data besarnya bantuan permodalan bagi UMKM melalui pembiayaan *musyarakah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)

Tabel 4.3

No.	Informan	Skala Usaha	Asset
1	P1	Mikro	15.000.000
2	P2	Kecil	150.000.000
3	P3	Kecil	300.000.000
4	P4	Menengah	725.000.000

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam penyaluran permodalan kepada UMKM sudah merata, baik dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶⁹ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

Sesuai dengan pernyataan P1 (nasabah BPRS BDS wirausaha CV. Agro Sukses Abadi) menyatakan bahwa dari segi permodalan usaha beras organik CV. Agro Sukses Abadi sudah bekerja sama dengan BPRS BDS, besarnya bantuan pinjaman permodalan yang di berikan oleh BPRS BDS yaitu sebesar Rp15.000.000. Namun untuk ke arah bimbingan itu belum ada, BPRS BDS memberikan permodalan dalam bentuk pembelian alat produksi, prosesnya cukup mudah dan mungkin hanya masalah magin yang terlalu besar dibandingkan bank konvensional. Sedangkan pernyataan P2 (nasabah BPRS BDS wirausaha “Kedai Sehat”) yang menyatakan bahwa BPRS BDS memberikan bantuan permodalan untuk usahanya sebesar Rp150.000.000, selama ini dengan BPRS BDS lebih kepada mitra lembaga secara keuangan dan dari sisi margin jauh lebih berbeda dengan berbagai produk syariahnya. Kalau di BDS marginnya atau bagi hasilnya mendapat 1,5%, sedangkan di BPD Syariah itu saya kurang dari 1%. Artinya dari sisi margin lebih tinggi. Kemudian pernyataan P3 (nasabah BPRS BDS wirausaha konveksi Mulia Konveksi) yang menyatakan bahwa BPRS BDS memberikan bantuan permodalan sekitar Rp300.000.000 dalam hal permodalan untuk tambahan mesin, pelebaran tempat. Modal yang diberikan BPRS BDS telah mengembangkan usaha konveksi “Mulia Konveksi”. Dan pernyataan P4 (nasabah BPRS BDS Properti) yang menyatakan bahwa BPRS BDS memberikan bantuan permodalan sekitar Rp.725.000.000 dalam hal permodalan untuk modal kerja dalam bidang properti.

Kemudian BPRS BDS juga memberikan perhatian dalam bentuk pelatihan tentang UMKM dan getring UMKM.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan bantuan (pinjaman) permodalan kepada UMKM benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan memberikan perhatian lebih intensif. BPRS BDS telah memberikan bantuan (pinjaman) permodalan kepada UMKM dari hasil analisa nasabah tersendiri atau nasabah tersebut memang benar-benar membutuhkannya. Sehingga jika nasabah tidak membutuhkan permodalan, maka BPRS BDS tidak memberikan modal bagi yang tidak membutuhkan. BPRS BDS akan melakukan analisis nominal yang tepat untuk nasabah yang dinamakan analisis kebutuhan modal untuk mengetahui kebutuhan modal nasabah dengan jumlah tertentu supaya BPRS BDS memberikan pembiayaan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dan dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam penyaluran permodalan kepada UMKM sudah merata, baik penyaluran permodalan dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Peran BPRS BDS Terhadap Pemberdayaan Sektor UMKM Melalui Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang faktor penghambat dan pendukung dalam **peran (kontribusi)** perbankan syariah khususnya BPRS di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta:

...“Faktor pendukung di BDS itu banyak baik dari internal maupun eksternal. Misalnya dari internal SDM merupakan bagian dari komitmen kita. Adanya BDS itu sendiri yaitu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada ummat dan itu merupakan salah satu tujuan dari visi misi BDS itu sendiri. Faktor penghambat yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan menset skema riba, skema bunga atau yang berbasis bunga maka dari itu perlu edukasi yang panjang untuk masyarakat”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung di BDS banyak baik dari internal maupun eksternal. Misalnya dari internal SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan bagian dari komitmen BPRS BDS. Adanya BPRS BDS sendiri untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada ummat dan hal itu merupakan salah satu tujuan dari visi-misi BPRS BDS. Termasuk pemegang-pemegang saham BPRS BDS yang sebagian besar merupakan seorang pengusaha, sehingga banyak mendorong BPRS BDS untuk banyak berkontribusi di sektor UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan *mindset* skema riba, skema bunga atau yang berbasis bunga, maka diperlukan edukasi yang panjang untuk masyarakat. Namun

⁷⁰ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

masyarakat sendiri juga pragmatis dalam arti, sebenarnya BPRS BDS ingin bekerja sama dalam penyaluran dana dengan skim bagi hasil, tetapi yang terjadi di masyarakat justru masih membandingkan hasilnya yang disetarakan dengan bunga yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan skim hutang dan bunga.

*...“Faktor pendukung : Jadi BDS mempunyai jaringan yang cukup luas untuk mengembangkan UMKM itu sendiri, banyak industri-industri kecil yang bisa kita danai. Terus dari Drs. H. Sunardi Syahuri selaku pemegang saham kendalipun meminta kepada BDS untuk bisa lebih memberikan kontribusinya kepada sektor UMKM. Faktor penghambat :Yang menjadi penghambat dalam melakukan analisa biasanya sektor UMKM jarang mempunyai catatan keuangan”.*⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung BPRS BDS yaitu mempunyai jaringan yang cukup luas untuk mengembangkan UMKM. Banyak industri-industri kecil yang bisa didanai oleh BPRS BDS. salah satu contohnya yaitu BPRS BDS mempunyai jaringan BMT yang ada di DIY. Kemudian dari pemegang saham kendalipun meminta kepada BPRS BDS untuk bisa lebih memberikan kontribusinya kepada sektor UMKM. Ada beberapa asosiasi BMT yang mana BMT tersebut juga menjadi bagian dari sektor UMKM, misalnya di Yogyakarta ada namanya KOSIDO, yaitu Koperasi Indonesia yang mana jika anggota KOSIDO ingin mendapatkan pembiayaan di BPRS BDS, maka BPRS BDS akan berikan kemudahan bagi anggota KOSIDO. Beberapa industri UMKM yang lain juga yang terasosiasi dengan BPRS BDS. Sedangkan faktor penghambat yang menjadi dalam melakukan analisa dimana

⁷¹ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

biasanya sektor UMKM tidak mempunyai catatan keuangan. Hal tersebut yang membuat BPRS BDS lebih berhati-hati dalam melakukan analisa, karena biasanya UMKM tidak mempunyai rekomendasi itu. Penjualan juga tidak pernah dicatat, jadi memang murni BPRS BDS percaya dari hasil wawancara dengan nasabah itu sendiri.

*...“Adapun faktor penghambatnya yaitu dari segi SDM yang masih kurang sehingga pemasaran terbatas, masyarakat yang mengenal BDS juga tidak terlalu banyak karna promosi juga kurang sehingga kepercayaan masyarakat juga masih terbatas. Sedangkan dari faktor pendukung itu sendiri biasanya ada komunitas-komunitas sudah mengenal BDS misalnya pengajian-pengajian yang ada di Jogokaryan yang sudah mengenal BDS”.*⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor penghambatnya yaitu dari segi SDM yang masih kurang, sehingga pemasaran BPRS BDS terbatas. Masyarakat yang mengenal BPRS BDS juga tidak terlalu banyak karena promosi juga kurang, sehingga kepercayaan masyarakat juga masih terbatas. Sedangkan dari faktor pendukung biasanya ada komunitas-komunitas sudah mengenal BPRS BDS, misalnya pengajian-pengajian yang ada di Jogokaryan yang sudah mengenal BPRS BDS yang mengenal pemilik lembaganya maupun sosialisasi karyawan dengan mengikuti acara-acara di Jogokaryan yang meminta sponsor kepada BPRS BDS dan mengikuti acara-acara di Jogokaryan. Sehingga mereka menjadi faktor mendukung untuk ikut serta menjadi nasabah BPRS BDS. Sedangkan untuk UMKM, misalnya usaha-usaha tempe yang masih ada juga dibiayai BPRS BDS sampai sekarang. Usaha tempe tersebut juga

⁷² Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

memberikan kontribusi ketika BPRS BDS sedang mengadakan acara atau kegiatan seperti milad BPRS BDS. Jadi ada *take and give* antara bank dan nasabah. Kemudian saat acara milad BPRS BDS juga ada *workshop* tentang UMKM, *workshop* mengenai pembiayaan terutama ke mitra-mitra BPRS BDS untuk membuat analisa keuangan, pembiayaan yang baik, kemudian cara bagaimana agar angsuran tertib, dan BPRS BDS memberikan pembelajaran kepada nasabah tentang UMKM.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam peran (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta adalah faktor pendukung di BDS banyak baik dari internal (SDM) maupun eksternal (pemegang-pemegang saham BPRS BDS yang sebagian besar merupakan seorang pengusaha, sehingga banyak mendorong BPRS BDS untuk banyak berkontribusi di sektor UMKM). BPRS BDS yaitu mempunyai jaringan yang cukup luas untuk mengembangkan UMKM. Banyak industri-industri kecil yang bisa didanai oleh BPRS BDS, dimana BDS mempunyai jaringan BMT (asosiasi BMT yaitu Koperasi Indonesia atau KOSIDO) yang ada di DIY. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya komunitas-komunitas sudah mengenal BPRS BDS, misalnya pengajian-pengajian yang ada di Jogokaryan yang sudah mengenal BPRS BDS dan sosialisasi karyawan dengan mengikuti acara-acara di Jogokaryan yang meminta sponsor kepada BPRS BDS serta melalui acara milad BPRS BDS, *workshop*

tentang UMKM dengan mitra-mitra BPRS BDS untuk membuat analisa keuangan, pembiayaan yang baik, cara agar angsuran tertib, dan BPRS BDS memberikan pembelajaran kepada nasabah tentang UMKM.

Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan *mindset* skema riba, maka diperlukan edukasi yang panjang untuk masyarakat. Masyarakat masih bersikap pragmatis dalam arti, masyarakat masih membandingkan hasilnya yang disetarakan dengan bunga yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan skim hutang dan bunga. Selain itu, sektor UMKM tidak mempunyai catatan keuangan, penjualan juga tidak pernah dicatat. Hal tersebut yang membuat BPRS BDS lebih berhati-hati dalam melakukan analisa dari hasil wawancara dengan nasabah. Kemudian SDM BPRS BDS yang masih kurang, sehingga pemasaran BPRS BDS terbatas, sehingga masyarakat yang mengenal BPRS BDS juga tidak terlalu banyak.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang **faktor** pengambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal **bantuan (pinjaman)** permodalan melalui pembiayaan musyarakah terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta:

*...“Faktor penghambat dalam hal bantuan sebenarnya tidak ada, jadi penghambatnya lebih ke analisa dari nasabah itu sendiri. Jadi misalnya kita mau menyalurkan dana ternyata nasabah itu sendiri kurang jujur sehingga pihak bank harus lebih jeli”.*⁷³

⁷³ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor penghambat dalam hal bantuan sebenarnya tidak ada. Jadi penghambatnya lebih ke analisa dari nasabah itu sendiri. Jadi faktor penghambatnya dalam hal analisa. Misalnya BPRS BDS akan menyalurkan dana ternyata nasabah itu sendiri kurang jujur, sehingga pihak bank harus lebih jeli. Nasabah mengajukan permodalan Rp50.000.000 untuk modal usaha namun di lapangan modal tersebut tidak digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan yang dijenjang. Misalnya hanya UMKM yang jualan di pasar, tidak memungkinkan meminta laporan keuangan. Biasanya dapat dari hasil wawancara, kira-kira pendapatan perharinya berapa dll. Data dari hasil wawancara yang akan diformulasikan dan kemudian dianalisa. Akan tetapi untuk UMKM yang sudah cukup besar seperti BMT atau toko-toko yang sudah mempunyai pembukuan, petugas akan meminta laporan keuangan karena dasar sistem bagi hasil sebenarnya ada di laporan. Jadi jika tidak ada laporan bagaimana akan memberikan bagi hasilnya.

*...“Kalau selama ini sih ya tidak ada masalah kalau dari sisi permodalan. In sya Allah masih cukup, lebih dari cukuplah untuk memberikan permodalan”.*⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa selama ini tidak ada masalah dari sisi permodalan atau lebih dari cukup untuk memberikan permodalan.

⁷⁴ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

...“Kalau dalam hal bantuan permodalan selama ini BDS tidak ada masalah, karna pemegang-pemegang saham BDS rata-rata pengusaha, sehingga mereka banyak mendorong BDS untuk berkontribusi dalam sektor UMKM”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam hal bantuan permodalan selama ini BPRS BDS tidak ada masalah, karena pemegang-pemegang saham BPRS BDS sebagian besar pengusaha. Sehingga pemegang-pemegang saham BPRS BDS banyak mendorong BPRS BDS untuk berkontribusi dalam sektor UMKM.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta adalah faktor penghambat dalam hal bantuan tidak ada atau tidak ada masalah dari sisi permodalan atau lebih dari cukup untuk memberikan permodalan. Faktor penghambatnya terkait analisa dari nasabah atau kejujuran nasabah itu sendiri dimana modal usaha tersebut tidak digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya. Kemudian laporan keuangan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan yang dijenjang, misalnya UMKM yang jualan di pasar, tidak memungkinkan meminta laporan keuangan.

Faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta

⁷⁵ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

adalah pemegang-pemegang saham BPRS BDS banyak mendorong BPRS BDS untuk berkontribusi dalam sektor UMKM.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang tentang **faktor** penghambat dan pendukung dalam menentukan (memberikan) besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta:

...“Tidak ada, jadi ya disesuaikan dengan analisa. Jadi untuk pembiayaan diatas100 juta kita namakan dengan analisa modal kerja, jadi kalau nasabah diatas 100 juta kita syaratkan dia harus mempunyai laporan keuangan walaupun laporan manual”.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tidak ada faktor penghambat dalam menentukan (memberikan) besarnya bantuan (pinjaman) permodalan, jadi disesuaikan dengan analisa. Jadi untuk pembiayaan di atas Rp100.000.000 dinamakan dengan analisa modal kerja, sehingga jika nasabah pembiayaan di atas Rp100.000.000 disyaratkan harus mempunyai laporan keuangan walaupun laporan manual. Karena logikanya, ketika memberikan kucuran dana di atas Rp100.000.000 tetapi pengelolaan atau laporan saja tidak ada, maka pengelolaannya belum bagus dalam kapasitasnya. Misalnya nasabah mengajukan Rp200.000.000 tetapi laporan keuangannya masih belum memenuhi syarat atau standar, maka petugas akan menganalisa kembali.

⁷⁶ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

...*“Tidak ada masalah selama ini fine-fine saja dari sisi nominal si tidak ada masalah”*.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa selama ini tidak ada faktor penghambat dalam menentukan (memberikan) besarnya bantuan (pinjaman) permodalan masalah dari sisi nominal.

...*“Tidak ada, karna biasanya kendalanya bukan di UMKM nya namun di produk nya. Misal usaha tempe yang kesulitan mendapatkan bahan baku kedelai”*.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa tidak ada faktor penghambat dalam menentukan (memberikan) besarnya bantuan (pinjaman) permodalan, karena biasanya kendalanya bukan di UMKM-nya tetapi pada produk-nya. Misalnya usaha tempe yang kesulitan mendapatkan bahan baku kedelai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam menentukan (memberikan) besarnya bantuan (pinjaman) permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta adalah tidak ada faktor penghambat dalam menentukan (memberikan) besarnya bantuan (pinjaman) permodalan, jadi disesuaikan dengan analisa modal kerja. Kendalanya adalah dalam hal laporan keuangannya masih belum memenuhi syarat atau standar. Selain itu,

⁷⁷ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

⁷⁸ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

faktor penghambat adalah bukan di UMKM-nya, tetapi pada produk-nya, misalnya usaha tempe yang kesulitan mendapatkan bahan baku kedelai.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang tentang **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal dukungan kebijakan pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta:

*...“Iya, dari hal kebijakan memang ketika usaha itu baru memulai itu belum bisa kita danai jadi minimal sudah berjalan selama satu tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang misalnya seorang guru ia ingin membuka usaha warung tidak harus ia mempunyai warung dan berjalan selama 1 tahun baru kita kucurkan modal krn yang terpenting dia mempunyai sumber pendapatan”.*⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam hal kebijakan pemberian kredit, karena ketika usaha itu baru dimulai belum dapat didanai. Jadi minimal sudah berjalan selama satu tahun. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diberikan bantuan, misalnya seorang guru ingin membuka usaha warung, maka tidak harus mempunyai warung dan berjalan selama 1 (satu) tahun. Hal yang terpenting bahwa seseorang tersebut mempunyai sumber pendapatan. Dalam analisa BPRS BDS bisnis membutuhkan kestabilan, jadi ketika bisnis sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun, maka bisnis tersebut sudah punya kestabilan. BPRS BDS pernah mengucurkan program modal usaha untuk usaha remaja masjid. Saat waktu ramadhan ada jajanan pasar kemudian dikucurkan kepada

⁷⁹ Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

beberapa remaja masjid di kota dengan modal modal Rp.1 juta. Kemudian misalnya ada seorang ibu-ibu ingin membuka usaha warung yang belum bekerja, tetapi suaminya yang bekerja, sehingga ketika warung tersebut belum stabil, maka dapat di *backup* dari pendapatan suaminya. Pada intinya memungkinkan tidak harus usaha itu berjalan satu tahun, akan tetapi jika memang usaha itu adalah satu-satunya sumber pengembalian dari usaha tersebut, maka disyaratkan minimal 1 (satu) tahun.

...“Menjadi tidak mendukung yah, bukan tidak mendukung. Jadi kita tetap mendukung untuk itu. hanya saja dana yang kita kelola itu dana masyarakat, artinya pihak perbankan juga harus mempunyai rambu-rambu untuk kehati-hatian”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BPRS BDS tetap mendukung, hanya saja dana yang dikelola adalah dana masyarakat. Artinya pihak perbankan juga harus mempunyai rambu-rambu untuk kehati-hatian. Jadi kalau untuk pemula BPRS BDS tidak bisa memberikan pembiayaan *musyarakah*, tetapi BPRS BDS bisa memberikan dalam bentuk *qodhul hasan*. *Qodhul hasan* merupakan dana dari ZIS yang dikelola kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya ketika seseorang yang ingin memulai usaha dari awal, maka diberikan secara tidak perlu membagi hasil kepada BPRS BDS. Jadi memang tidak besar yaitu sekitar Rp2.000.000 dan dapat tanpa jaminan. Jika usahanya bagus atau usahanya mulai berkembang atau

⁸⁰ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

sudah berjalan dan kemudian ingin mengembangkan usahanya, maka BPRS BDS akan memberikan pembiayaan *musyarakah*. Jadi ada tahapannya, BPRS BDS harus memberikan solusi-solusi kepada masyarakat, jika masyarakat mempunyai *skill* dalam usaha.

...“Kalau dari faktor penghambat dan pendukung kan karna *musyarakah* itu ini kalau pembiayaan itu untuk usaha kenapa akadnya bukan *musyarakah* kenapa harus *murabahah* kan ada tuh”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, misalnya ada usaha klontong yang ingin pinjam di BPRS BDS, tetapi analisa keuangan atau macam-macam belum bisa, amka dari bank menawarkan produk *murabahah* yang nantinya akan dibelikan barang. Kalau usaha lagi menurun, BPRS BDS tidak akan menuntut uang banyak kepada nasabah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal dukungan kebijakan pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta adalah usaha yang baru dimulai belum dapat didanai. Usaha tersebut minimal sudah berjalan selama satu tahun. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk diberikan bantuan, misalnya seorang guru yang mempunyai sumber pendapatan ingin membuka usaha warung atau seorang ibu-ibu yang belum bekerja ingin membuka usaha warung, tetapi suaminya yang bekerja, maka dapat di *backup* dari pendapatan suaminya. Intinya memungkinkan tidak harus usaha itu berjalan satu

⁸¹ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

tahun, akan tetapi jika memang usaha itu adalah satu-satunya sumber pengembalian dari usaha tersebut, maka disyaratkan minimal 1 (satu) tahun.

Faktor pendukungnya dalam hal dukungan kebijakan pemberian bantuan (pinjaman) permodalan adalah untuk pemula BPRS BDS tidak bisa memberikan pembiayaan *musyarakah*, tetapi BPRS BDS bisa memberikan dalam bentuk *qodhul hasan*. *Qodhul hasan* merupakan dana dari ZIS yang dikelola kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan atau bank menawarkan produk *murabahah* yang nakan dibelikan barang yang aman jika usaha lagi menurun, BPRS BDS tidak akan menuntut uang banyak kepada nasabah.

Berikut ini kutipan wawancara dengan *informan* tentang tentang **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian yang lebih intensif:

...“Faktor pendukung dari sisi modal yaitu peran serta masyarakat yang mempercayakan dananya ke BDS. Sedangkan faktor penghambat ya tadi, tingkat pemahan masyarakat tentang bank syariah sendiri yang secara khusus pemahaman tentang bagi hasil, tentang sirkah, tentang kemitraan itu juga termasuk”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung dari sisi modal yaitu peran serta masyarakat yang mempercayakan dananya ke BPRS BDS. Sedangkan faktor penghambatnya tingkat pemahanan

⁸² Wawancara Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS) pada tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

masyarakat tentang bank syariah sendiri secara khusus tentang bagi hasil, tentang sirkah, dan tentang kemitraan. Paradigma-paradigma lama tentang pinjaman dan bunga yang menjadi penghambat.

...*“Selama ini faktor pendukungnya si nasabah masih fine-fine saja dan tidak ada masalah, tergantung jenis usahanya”*.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa selama ini tidak ada masalah. Setorannya dapat dilakukan setiap bulan yang juga tergantung jenis usahanya. Misalkan peternak lele akan panen setiap 3-4 bulan, maka diberikan modal baik pokok dan bagi hasil yang dibayar diakhir setelah panen, sehingga tidak harus bayar setiap bulan. Ada juga ada pembiayaan properti dengan objek 4 kapling. Properti memang termasuk usaha menengah ke atas dan diberikan pembiayaan jangka waktu sesuai dengan proyeksi penyelesaian proyek itu. Baik bagi hasil maupun pokok itu dibayarkan setiap termin ketika properti laku. Sedangkan faktor pendukung yaitu dari pembiayaan musyarakah yang sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan kondisi di lapangan. Jika tidak dapat memberikan bagi hasil di setiap bulannya, maka dapat dibayarkan diakhir, jadi tinggal kesepakatan BPRS BDS dengan nasabah. Ada juga yang sistemnya nasabah bisa memberikan bagi hasil setiap bulan, tetapi pokok dibayarkan diakhir itu juga ada yang seperti itu, ada juga yang dia usahanya karena sudah berjalan. Hanya saja dapat *sharing* modal untuk perputaran usahanya yang bisa dengan diangsur setiap bulan juga ada.

⁸³ Wawancara Ibu Anis Mu'arifah (Manajer Marketing BPRS BDS) pada tanggal 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

Kalau usaha klontong kebanyakan diangsur karena kalau usaha kelontong sirkulasinya setiap hari. Pokok dan bagi hasil dibayarkan setiap bulan, kalau dibuat sistem tempo, maka uangnya tidak akan kembali, tetapi misalnya ternak udang, ternak lele, sektor pertanian yang butuh modal diawal kemudian pokok dan bagi hasil baru bisa dibayar diakhir. Faktor penghambatnya kalau di bagian properti yang pernah dialami yaitu ternyata waktu yang sudah disepakati tidak sesuai. Artinya proyek mundur, pendapatan yang harusnya diterima di 10 bulan pertama kemudian mundur 6 bulan, maka akan menjadi 16 bulan. Jadi seharusnya BPRS BDS sudah mendapatkan bagi hasil di 10 bulan pertama, akan tetapi BPRS BDS mendapatkan bagi hasil di 16 bulan berikutnya. Faktor penghambat selanjutnya adalah kebijakan dari pihak eksternal yaitu kebijakkan pemerintah yang kadang berdampak pada pihak bank.

*...“Faktor pendukungnya ya dari masyarakat yang mempercayakan BDS untuk mengelola dananya. Sedangkan faktor penghambatnya dari kebijakan pemerintah yang kadang berimbas pada pihak bank, tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai bank syariah”.*⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukungnya dari masyarakat sendiri yang mempercayakan BPRS BDS untuk mengelola dananya. Sedangkan faktor penghambatnya dari kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada pihak bank. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai bank syariah.

⁸⁴ Wawancara Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS) pada tanggal 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

Sedangkan pernyataan P3 (nasabah BPRS BDS wirausaha CV. Agro Sukses Abadi) yang menyatakan bahwa dari segi permodalan masih mengalami kesulitan pengembangan permodalan atau *top up*, prosesnya kredinya cukup mudah dan mungkin hanya masalah magin yang terlalu besar dibandingkan bank konvensional, adanya perhatian yang lebih intensif seperti pelatihan tentang UMKM, meskipun CV. Agro Sukses Abadi belum pernah diundang. Sedangkan pernyataan P2 (nasabah BPRS BDS wirausaha “Kedai Sehat”) yang menyatakan bahwa faktor penghambatnya tidak ada dalam permodalan terkait dengan besarnya bantuan permodalan yang BDS berikan kepada usaha. Kemudian pernyataan P1 (nasabah BPRS BDS wirausaha konveksi Mulia Konveksi) yang menyatakan bahwa dukungan kebijakan bank merasionalisasikan kebutuhan nasabah dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, sehingga tidak mengalami kesulitan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian yang lebih intensif adalah faktor pendukung dari sisi modal yaitu peran serta masyarakat yang mempercayakan dananya ke BPRS BDS. Selain itu, faktor pendukung yaitu dari pembiayaan masyarakat yang sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan kondisi di lapangan. Jika

tidak dapat memberikan bagi hasil di setiap bulannya, maka dapat dibayarkan diakhir, jadi tinggal kesepakatan BPRS BDS dengan nasabah.

Sedangkan faktor penghambatnya tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang bank syariah sendiri secara khusus tentang bagi hasil, tentang sirkah, dan tentang kemitraan. Paradigma-paradigma lama tentang pinjaman dan bunga yang menjadi penghambat. Selain itu masalah pada pembiayaan sektor properti yang mana bagi hasil maupun pokok itu dibayarkan setiap termin ketika properti tersebut laku. Akan tetapi ternyata waktu yang sudah disepakati tidak sesuai. Artinya proyek mundur, pendapatan yang harusnya diterima di 10 bulan pertama kemudian mundur 6 bulan, maka akan menjadi 16 bulan. Faktor penghambat selanjutnya adalah kebijakan dari pihak eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang kadang berdampak pada pihak bank.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Peran BPRS BDS Terhadap Pemberdayaan Sektor UMKM Melalui Pembiayaan *Musyarakah*

Hasil analisis bahwa peran BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM melalui pembiayaan *musyarakah* adalah penyaluran kredit *musyarakah* dan *murabahah* BPRS BDS yang hampir berimbang dimana porsi pembiayaan *musyarakah* yang cukup besar yang menunjukkan bahwa penyaluran dalam sektor rill cukup besar. BPRS BDS memberikan kemudahan dalam bentuk pembiayaan, memberikan kemudahan kepada sektor UMKM untuk bisa mendapat pembiayaan

yang cepat, efisiensi, dan mudah terutama pada sektor mikro. BPRS BDS juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, di antaranya ada pelatihan UMKM, pelatihan tentang manajemen keuangan/laporan keuangan ke nasabah, *gathering* UMKM, sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Kinerja perbankan syariah dan kontribusi pembiayaan perbankan syariah yang besar ini, maka menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi domestik khususnya bagi UMKM.

Berikut data besarnya bantuan permodalan bagi UMKM melalui pembiayaan *musyarakah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)

Tabel 4.4

No.	<i>Informan</i>	Skala Usaha	Asset
1	P1	Mikro	15.000.000
2	P2	Kecil	150.000.000
3	P3	Kecil	300.000.000
4	P4	Menengah	725.000.000

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam penyaluran permodalan kepada UMKM sudah merata, baik dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu Bank Syariah perlu membuat desain produk yang bisa memberi jalan bagi bank syariah untuk bisa bersatu mengembangkan usaha UMKM. Saat ini bermuculan upaya bank syariah untuk bisa memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Selama ini masih ada saja perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan

baru karena dinilai belum jelas prospeknya. Selain bertujuan membantu memberi akses permodalan kepada UMKM, ditubuh perbankan syariah, optimalisasi terhadap pembiayaan di sektor mikro menjadi salah satu potensi bisnis yang baik untuk masa depan. Produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Secara teoritis peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pembiayaan *musyarakah* ini merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dalam menjalankan peranan tertentu. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.⁸⁵

Secara teoritis pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT. BPRS BDS ini merupakan upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Proses pemberdayaan dalam konteks

⁸⁵ Cohen, Bruce J. *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. hlm.57.

aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.⁸⁶ Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan

⁸⁶ Priyono, Onny S., & AMW Pranaka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. 1996. hlm. 2-8.

terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.⁸⁷

2. Faktor Pengambat dan Pendukung Peran BPRS BDS Terhadap Pemberdayaan Sektor UMKM Melalui Pembiayaan *Musyarakah*

Hasil analisis bahwa faktor pengambat dan pendukung Peran BPRS BDS Terhadap Pemberdayaan Sektor UMKM Melalui Pembiayaan *Musyarakah* adalah faktor pendukung di BDS banyak baik dari internal (SDM) maupun eksternal (pemegang-pemegang saham BPRS BDS yang sebagian besar merupakan seorang pengusaha yang memiliki permodalan besar, sehingga banyak mendorong BPRS BDS untuk banyak berkontribusi di sektor UMKM). BPRS BDS yaitu mempunyai jaringan yang cukup luas untuk mengembangkan UMKM. Banyak industri-industri kecil yang bisa didanai oleh BPRS BDS, dimana BDS mempunyai jaringan BMT (asosiasi BMT yaitu Koperasi Indonesia atau KOSIDO) yang ada di DIY. Bank-bank syariah lain juga melakukan hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Sektor ekonomi di Yogyakarta secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor UMKM. Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang

⁸⁷Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004. Hlm. 80-81.

tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan.

Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya adanya jaminan kebendaan dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui UMKM.

Masalah di sektor UMKM relatif begitu kompleks, dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini

bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep *linkage*, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, serta kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani tetapi juga berbeda antarwilayah, antarsentra, antarsektor/antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit usaha dalam kegiatan/sektor yang sama.